

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya untuk mencari perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, kajian terdahulu juga dapat menjadi bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu, dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian pertama, berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini Pada PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI) di TK Negeri 1 Pembina Mojosari” oleh Hani Laili Hafidzoh (2022). Metode penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data analisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi data, kecukupan referensi, dan meningkatkan ketekunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PAUD-HI di TKN 1 Pembina Mojosari untuk memenuhi hak pendidikan dan pengasuhan dilaksanakan cukup baik. Pada pemenuhan hak pendidikan telah terlaksana 7 prinsip dari 10 prinsip yang sesuai dengan layanan pendidikan pada PAUD-HI dan 3 prinsip layanan pendidikan masih samar dalam pelaksanaannya. Pada pemenuhan hak pengasuhan dilaksanakan melalui program parenting dan adanya upaya guru dalam melibatkan orang tua pada kegiatan anak di sekolah, serta guru juga selalu memantau perkembangan anak dan mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua, dan hal ini sesuai dengan layanan pengasuhan pada PAUD-HI. Peran guru dalam memenuhi hak pendidikan dan pengasuhan memiliki peran yang penting dalam pemenuhan hak pendidikan dan

pengasuhan, diantaranya guru sebagai perancang pembelajaran, pendidik kegiatan belajar, mengevaluasi perkembangan dan juga memantau perkembangan anak-anak. Pemenuhan hak pendidikan dan pengasuhan pada PAUD-HI di TKN 1 Pembina Mojosari, terlaksana dengan baik meskipun masih terlihat beberapa layanan samar pada pelaksanaannya. Pada perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pendidikan dan pengasuhan anak usia dini holistik integratif di TK Negeri 1 Pembina Mojosari, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan PAUD HI di Kota Bogor.

Penelitian kedua, berjudul “Hambatan Implementasi PAUD Berbasis Holistik Integratif” oleh Ambriani, Dadan Suryana (2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai hambatan implementasi PAUD HI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat tema hambatan implementasi PAUD HI belum maksimalnya pemahaman guru terhadap PAUD HI, minimnya sosialisasi dari dinas atau pemerintah setempat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam layanan PAUD, dan terbatasnya sarana dan prasarana. Implikasi hasil penelitian ini dapat digunakan satuan PAUD dan pemerintah terkait untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan PAUD HI. Pada perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada hambatan dari implementasi PAUD yang berbasis holistik integratif secara keseluruhan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan PAUD HI di Kota Bogor.

Sumber: Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 6 Issue 2 (2022) Pages 5200-5208, ISSN: 2549-8959

Penelitian ketiga, berjudul “Penerapan PAUD Holistik Integratif Pada Masa Pandemi Covid 19” oleh Dewi Ayu Oktaviani, Dimiyati (2021). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan PAUD Holistik Integratif pada masa Pandemi Covid 19 di KB-TK Aldercy Islamic

School Surakarta. Metode penelitian yang digunakan ialah deksriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teknik domain analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan paudholistik integratif di KB-TK Aldercy Islamic School berjalan dengan cukup baik dan berhasil, pelaksanaannya tetap mengacu pada standar Perpres No 60 Tahun 2013. Hal ini dapat terlihat dari hasil pengumpulan data yang meliputi 5 layanan pelaksanaan dalam pendidikan (kesehatan gizi, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan). Dukungan dari berbagai pihak (guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, orang tua, komite sekolah) dalam penyelenggaraan pendidikan anak selama covid 19 menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pendekatan holistik integratif. Pada perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan PAUD HI pada masa pandemi covid 19 di KB-TK Aldercy Islamic School Surakarta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan PAUD HI di Kota Bogor.

Sumber: Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 5 Issue 2 (2021) Pages 1870-1882, ISSN: 2549-8959

Penelitian keempat, berjudul “Implementasi PAUD HI (Holistik Integratif Pada TK di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022” oleh Baiq Den Ayu Ligina, I Nyoman Suarta, Nurhasanah (2022). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi layanan PAUD Holistik Integratif pada TK di Kabupaten Lombok Barat tahun 2022. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode survei. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan stratified proporsional random sampling, dengan populasi sejumlah 162 kepala lembaga dan sampel sebesar 15% atau 24 lembaga. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan rumus formula persentase. Adapun hasil

penelitian ini menunjukkan sebanyak 57% layanan pembelajaran sudah cukup dilaksanakan, 29% lembaga sudah melaksanakan layanan kesehatan dan gizi dengan menjalin hubungan kerjasama secara formal, 21% lembaga sudah menerapkan layanan peran orang tua dan pengasuhan, 8% lembaga sudah melaksanakan dan menjalin hubungan kerjasama dengan layanan perlindungan secara informal, dan rata-rata 45% lembaga sudah melaksanakan layanan keamanan dan kenyamanan di satuan lembaga. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi layanan-layanan PAUD Holistik Integratif pada TK di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 masih belum terlaksana secara menyeluruh. Pemerintah setempat harus lebih tanggap untuk pemeratakan program layanan PAUD Holistik Integratif dengan meningkatkan hubungan kerjasama satuan lembaga PAUD dengan instansi atau bidang yang terkait seperti KPAI. Pada perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada implementasi PAUD HI Pada TK di Kabupaten Lombok Barat dengan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan PAUD HI di Kota Bogor dengan metode penelitian kualitatif.

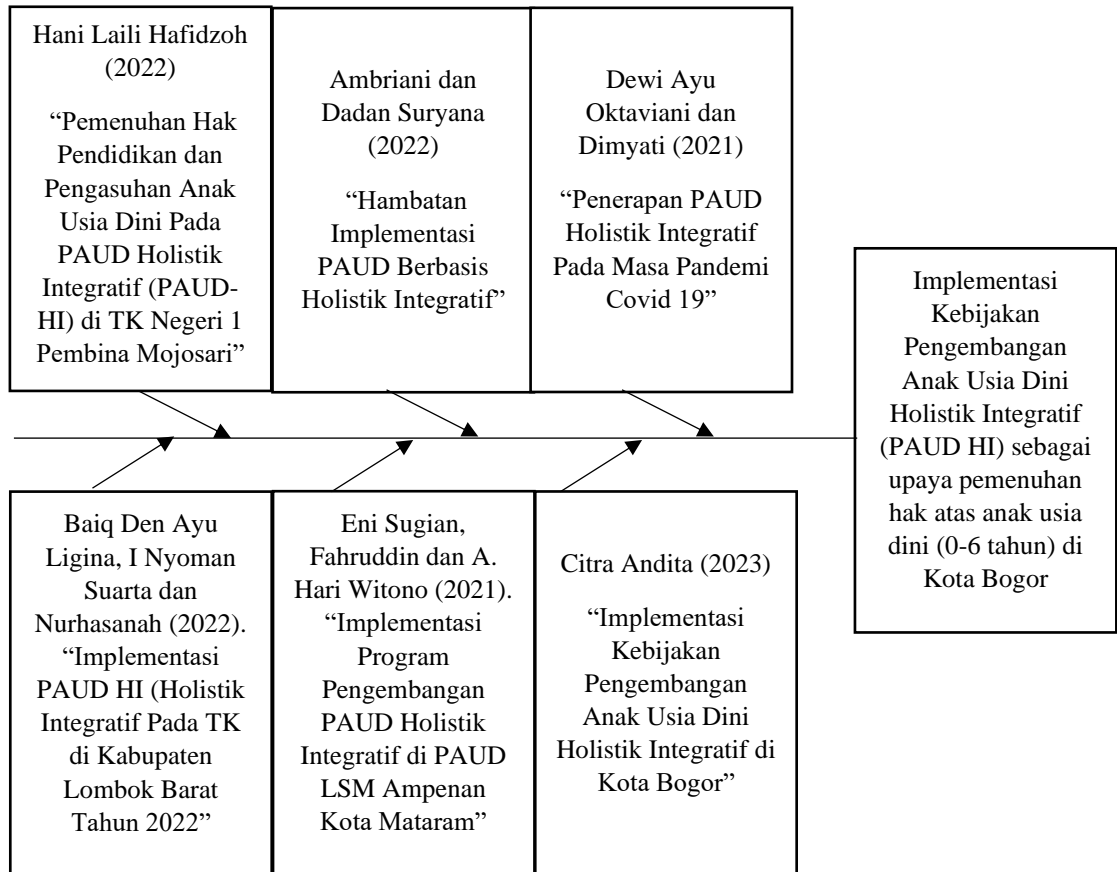
Sumber: Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Volume 7, Nomor 3, September 2022. ISSN: 2502-7069

Penelitian kelima, berjudul “Implementasi Program Pengembangan PAUD Holistik Integratif di PAUD LSM Ampenan Kota Mataram” oleh Eni Sugian, Fahrudin, A. Hari Witono (2021). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai analisis Implementasi Program PAUD Holistik Integratif di PAUD LSM Ampenan Kota Mataram yang mencakup perencanaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, subjek penelitian berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 orang kepala PAUD, 2 orang guru PAUD, 2 orang narasumber saat kegiatan sosialisasi yaitu dari tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat setempat, dan

4 orang tua murid, dengan objek penelitian di PAUD LSM Ampenan Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala lembaga PAUD LSM telah membuat program perencanaan sesuai dengan petunjuk teknis dan juknis penyelenggaraan program PAUD Holistik Integratif, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa Kepala PAUD LSM telah membuat perencanaan yang di buktikan dengan adanya Dokumen program perencanaan PAUD holistik integratif yang memuat tujuan, proses, dan prinsip perencanaan yang di susun oleh Kepala lembaga dan guru PAUD LSM Ampenan. Pada perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada implementasi program pengembangan PAUD HI di PAUD LSM Ampenan Kota Mataram, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan PAUD HI di Kota Bogor.

Sumber: Jurnal Ilmiah Mandala *Education*, Volume 7 Nomor 3, Agustus 2021. E-ISSN: 2656-5862

Gambar 2. 1 Diagram Fishbone



Sumber : diolah peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas umumnya penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berasal dari hasil penelitian terdahulu, artikel, dokumen pemerintah, dan lain-lain pada pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik intgeratif di Indonesia. Kemudian terdapat penelitian yang menggunakan metode literatur (*literature review*) yang mengedepankan penelusuran artikel-artikel penelitian terdahulu tentang implementasi PAUD-HI, selain itu sebagian besar penelitian dilakukan melalui perspektif kajian atau keilmuan Ilmu Pendidikan. Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus pada implementasi kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kota Bogor melalui perspektif kajian

atau keilmuan Administrasi Publik dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan menggunakan teori George C. Edwards III.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, maka pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Chandler dan Plano mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah public atau pemerintah (Kadji, 2015).

Pada dasarnya terdapat banyak Batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena banyaknya definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analis kebijakan. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eystone, Eystone mengatakan bahwa secara luas kebijakan public dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain dikemukakan oleh Chief J.O Udoji,

mengatakan “Siapa yang berpartisipasi dan apa perannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan bergantung pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri” (Mustari, 2015).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka peneliti dapat berpandangan bahwa kebijakan public merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan-pilihan yang ada untuk kemudian dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah demi terselesaikannya masalah-masalah yang ada di suatu negara dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu.

Ciri-ciri kebijakan publik sebagaimana menurut Wahab (dalam Mustari 2015:38) adalah :

- a) Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan
- b) Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri
- c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan setiap kebijakan pemerintah dilakukan dengan tindakan yang konkrit
- d) Kebijakann publik berbentuk kebijaksanaan yang positif dan negative. Dalam bentuk positif, kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara yang negative, kebijakan meliputi keputusan para pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.



Menurut James E. Anderson dalam (Herabudin, 2016) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut :

a) Kebijakan Substantif versus Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif, yaitu kebijakan yang menyangkut segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan procedural adalah cara menjalankan kebijakan substantif itu

b) Kebijakan Distributif versus Kebijakan Regulatori versus Kebijakan Redistributif

Kebijakan distributif berkaitan dengan distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Adapun kebijakan redistributive merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak antara berbagai kelompok dalam masyarakat

c) Kebijakan Material versus Kebijakan Simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplit pada kelompok sasaran. Adapun kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran

d) Kebijakan yang Berhubungan dengan Barang Umum

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan public. Adapun kebijakan private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Model-model Kebijakan Publik menurut Sinambela, dkk (2010) dalam (Setyawan, 2017) :

Model kebijakan merupakan deskripsi sederhana mengenai aspek-aspek penting yang dipilih dari suatu permasalahan yang ada

dan disusun untuk tujuan tertentu. Ia menambahkan bahwa model kebijakan juga dapat dipandang sebagai rekonstruksi artifisial dari realitas suatu wilayah dengan lingkungan dan kemanusiaan yang kompleks. Hubungannya dengan kebijakan public bahwa model deskripsi sederhana mengenai aspek-aspek penting yang dipilih dari suatu permasalahan yang ada dan disusun sebagai upaya mengejawantahkan, meniru, menjelaskan, meramalkan, mencoba dan menguji hipotesis kebijakan public untuk tujuan tertentu. Terdapat beberapa model kebijakan yang dapat digunakan dalam formulasi dan penentuan kebijakan, diantaranya:

1. Model deskriptif

Model ini digunakan untuk memperkirakan dan menjelaskan sebab dan akibat dari pilihan kebijakan mengenai suatu masalah tertentu. Dalam arti kata, model ini berfungsi untuk memonitoring aksi atau implementasi serta dampak yang muncul dari suatu kebijakan

2. Model normative

Model ini selain bertujuan memberikan perkiraan (prediksi) dan pemaparan tentang sebab akibat dari suatu kebijakan, juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mencapai beberapa utilitas atau nilai secara maksimal.

3. Model verbal

Model ini bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argument kebijakan, sekalipun bukan argument nilai-nilai angka yang pasti. Sehingga model ini sangat mudah dikomunikasikan serta dengan biaya yang murah melalui debat public.

4. Model simbolis

Model ini sulit dikomunikasikan ke public karena menggunakan symbol-simbol statistic, matematik dan logika. Bahkan para ahli

sering terjadi kesalah pahaman mengenai elemen-elemen dasar suatu kebijakan dari model ini. nemun kelemahan model ini memang terletak pada interpretasi hasil yang dinilai sulit.

#### 5. Model procedural

Model ini memperlihatkan hubungan dinamis antara variable-variabel yang menjadi ciri suatu kebijakan. Model ini menyimulasikan dan meneliti secara terperinci hubungan-hubungan yang ada, sehingga prediksi dan sosial terhadap suatu permasalahan diperoleh dengan maksimal.

Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik menurut William Dunn (Dunn, 1998) adalah sebagai berikut:

##### a) Penyusunan Agenda

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan emmasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

##### b) Formulasi Kebijakan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan, mengenai kendala-kendala yang

mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c) Adopsi Kebijakan

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrative bagi implementasi kebijakan.

d) Implementasi Kebijakan

Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai indicator kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas, dan ilmu dan teknologi.

e) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah diselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang

mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Dalam hal ini, penelitian akan membahas mengenai implementasi kebijakan PAUD HI.

### **2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling esensial dalam proses kebijakan public. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai factor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada dimensi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (Situmorang, 2016).

Mazaiman dan Sabaiter mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi serta menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Kemudian Van metter dan Van Horn mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan saaraan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana atau implementor kebijakan (Kadji, 2015).

Marilee S. Grindle mengemukakan bahwa implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berangkat dengan

mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin untuk saluran birokrasi, namun juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh 'apa' dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, Grindle menegaskan bahwa proses implementasi jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. Bahkan Udoji dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar suatu impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Subianto, 2020).

Dengan demikian peneliti menarik benang merah bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Pada prinsipnya kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengoperasionalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Apapun produk kebijakannya, berakhir pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut dapat teraktualisasi, maka berikut ini dideskripsikan beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan public sebagai berikut:

- 1) Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini menegaskan bahwa: “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakn public, implementor, dan kinerja kebijakan public”.

Beberapa variable yang mempengaruhi proses kebijakan public adalah:

- a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b) Karakteristik dan agen pelaksana/implementor
- c) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d) Kecenderungan dari pelaksana/implementor

## 2) Model Hoogwood & Gun

Model yang kedua adalah model yang diperkenalkan oleh Brian W. Hogwood & Lewis A. Gun (1978), menegaskan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- a) Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh Lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar
- b) Apakah untuk melaksanakannya tersedia cukup waktu dan sumber daya yang memadai
- c) Apakah perpaduan sumber daya yang diperlukan benar ada
- d) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang andal
- e) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi dengan asumsinya, bahwa semakin sikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai
- f) Apakah hubungan saling ketergantungan kecil

- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar
- h) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- i) Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model Hoogwood dan Gunn didasarkan pada konsepsi manajemen strategis yang mengarah kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan public.

### 3) Model George Edwards III

Model Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat factor dalam mengimplementasikan kebijakan public, yakni: “komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi”.

Keempat variable tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

#### a. Komunikasi

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. faktor komunikasi (dalam bentuk vertikal) memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka



kerjakan. Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi).

c. Disposisi

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring

kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan. Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur oprasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani.

#### 4) Model Warwic

Warwic mengatakan bahwa: “Dalam implementasi kebijakan terdapat factor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Kemampuan Organisasi
- b) Informasi
- c) Dukungan
- d) Pembagian Potensi

Penjelasan keempat factor tersebut sebagai berikut:

##### a. Kemampuan organisasi

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan tehnis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (Standard Operating Procedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

##### b. Informasi

Kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.

##### c. Dukungan

Kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.

d. Pembagian Potensi

Pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Dari beberapa teori implementasi kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti memilih teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Model teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward III bersifat top down dan cocok dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini karena Implementasi Kebijakan PAUD Holistik Integratif diimplementasikan pada level birokrasi yang terstruktur pada suatu Lembaga pemerintahan di mana setiap level hierarki mempunyai peran dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakannya.

Pendekatan-pendekatan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Purwanto dan Sulisyastuti (2012) dalam buku (Tresiana & Duadji, 2019) :

*Pertama*, Model Rasional (Top Down) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan implementasi berhasil, model ini menginterpretasikan Generasi II. Beberapa ahli yang digolongkan sebagai penganut pendekatan top down adalah; Nakamura dan smallwood, Edward III, Grindle, Van Meter dan Van Horn, Hood, Gunn, Sabatier dan Mazmanian. Pendekatan *top down* menggunakan logika berfikir dari atas kemudian melakukan pemetaan kebawah untuk melihat keberhasilan dan kegagalan

kebijakan. Analisis implementasi yang menggunakan pendekatan *top down* bertujuan untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan.

*Kedua*, pendekatan *bottom up*. Pendekatan ini merupakan kelompok yang melakukan kritik terhadap model *top down*, dalam hal pentingnya aktor lain dan interaksi organisasional. Pendekatan *bottom up* menekankan pada pentingnya dua aspek, yakni birokrat pada level bawah dan kelompok sasaran.

*Ketiga*, pendekatan *scientific* yang dikembangkan oleh Malcolm Goggin yang menyatakan bahwa variabel perilaku aktor pelaksana kebijakan akan lebih menentukan keberhasilan implementasi. Muncul pendekatan kontigensi atau situasional yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan ini relevan dengan generasi ketiga dalam studi implementasi yang melanjutkan dukungannya terhadap pendekatan *bottom up*, namun mereka lebih mengembangkan studi implementasi kearah lebih *scientific*.

### **2.2.3 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)**

#### **1) Pengertian**

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

## 2) Kebijakan PAUD HI

Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Program PAUD HI menjadi tanggung jawab semua pihak, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI menetapkan bahwa Pemerintah Daerah adalah pihak yang menyelenggarakan pelaksanaan PAUD HI pada tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan PAUD HI di Kota Bogor terkandung dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Bogor.

## 3) Prinsip Pelaksanaan PAUD HI

1. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi. Satuan PAUD sebagai wadah pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan,

perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan

2. Pelayanan yang berkesinambungan yakni layanan yang dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun
  3. Pelayanan non diskriminasi yakni layanan yang dilaksanakan secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak, suku, agama, ras, antar golongan
  4. Pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat. Lokasi layanan PAUD HI diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat
  5. Partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PAUD HI sehingga rasa memiliki program oleh masyarakat menjadi lebih kuat
  6. Berbasis budaya yang konstruktif yakni pemberian layanan dilakukan dengan memanfaatkan potensi local dan memperhatikan budaya setempat sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI
  7. Tata Kelola yang baik yakni pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Peran Pihak Terkait Penyelenggaraan PAUD HI
- PAUD HI memerlukan keterlibatan berbagai pihak terkait sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Peran Pihak Terkait Penyelenggaraan PAUD HI

No	Unsur	Peran
1.	Satuan PAUD	Penyelenggaraan layanan PAUD HI dengan bimbingan dan pengawasan instansi terkait
2.	Dinas Pendidikan	Melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan di Satuan PAUD
3.	Organisasi Mitra	Sebagai pendamping, pembuna, dan mitra kerja Satuan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD HI
4.	Posyandu	Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar kepada anak usia dini yang mencakup penimbangan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian vitamin A secara berkala
5.	Tokoh Masyarakat	Sebagai pendamping, pembina, dan mitra kerja Satuan PAUD dalam memberikan fasilitasi, advokasi, penyuluhan terkait dengan nilai dan budaya setempat yang sesuai dengan konten PAUD HI
6.	Orang Tua	Mitra Satuan PAUD dalam melaksanakan PAUD HI di Satuan PAUD dalam lingkungan keluarga.

Sumber : Dokumen Juknis PAUD HI di Satuan PAUD

## 5) Penerapan Layanan PAUD HI

### a. Layanan Pendidikan

Layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang diselenggarakan di Satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama, moral, fisik, motoric, kognitif, Bahasa, sosial, emosional dan seni. Layanan pendidikan menggunakan prinsip dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut:

- a) Belajar melalui bermain, pemberian rangsangan pendidikan melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak
- b) Berorientasi pada perkembangan anak, pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai usia anak
- c) Berorientasi pada kebutuhan anak, pendidik harus mampu memberi stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak
- d) Berpusat pada anak, pendidik harus menciptakan suasana yang dapat mendorong motivasi, kreativitas, inovasi dan kemandirian pada anak sesuai dengan potensi anak
- e) Pembelajaran aktif, pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak untuk aktif
- f) Berorientasi pada nilai-nilai karakter yang diarahkan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang dapat membentuk nilai karakter positif pada anak
- g) Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup yang dilakukan melalui pengarahan untuk mengembangkan kemandirian anak
- h) Didukung oleh lingkungan yang kondusif
- i) Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis agar anak memiliki rasa saling menghargai
- j) Pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna.



b. Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan

Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan di Satuan PAUD diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
- b. Pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan
- c. Pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- d. Pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal sehari-hari
- e. Memantau asupan makanan anak
- f. Penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka
- g. Pemantauan terhadap kondisi fisik anak secara sederhana, misalnya suhu tubuh.

Selain itu, memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)/ Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang (SDIDTK), perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak. Kemudian berkoordinasi kepada Himapaudi/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan atau memerlukan fasilitas lainnya.

c. Layanan Pengasuhan

Pengasuhan dilakukan dengan bekerja sama dengan orang tua melalui program Parenting. Program parenting diisi dengan kegiatan:

- a) Kelompok Pertemuan Orangtua (KPO) seperti penyuluhan, diskusi, simulasi seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, dan lain-lain
  - b) Konsultasi antara guru dan orangtua
  - c) Keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan bermain
  - d) Keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir
  - e) Keterlibatan orangtua diluar kelas, misalnya dengan menyediakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
  - f) Kegiatan bersama keluarga
- d. Layanan Perlindungan

Perlindungan untuk anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik dilakukan oleh Satuan PAUD dengan cara sebagai berikut:

- a. Memastikan lingkungan, alat dan bahan main yang digunakan dalam kondisi aman
- b. Memastikan tidak ada anak yang terkena diskriminasi
- c. Mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh
- d. Mengajarkan anak untuk menolong dirinya apabila mendapatkan perlakuan tidak nyaman, seperti meminta tolong atau menghindari tempat yang dirasa membahayakan
- e. Semua area di Satuan PAUD berada dalam jangkauan guru
- f. Semua anak mendapatkan perhatian yang sama
- g. Memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak
- h. Menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun dan saling menyayangi di lingkungan Satuan PAUD

- i. Memastikan anak pulang sekolah dalam kondisi aman
- e. Layanan Kesejahteraan

Layanan kesejahteraan diartikan bahwa Satuan PAUD memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk melaksanakan layanan kesejahteraan bagi anak, dilakukan hal-hal berikut:

- a. Membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran dengan melaporkan ke kelurahan untuk diproses
- b. Menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lain untuk program makan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal
- c. Membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan
- d. Memperlakukan semua anak dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian dan kemandirian anak
- e. Membiasakan untuk memberi penghargaan kepada anak atas usaha yang telah dilakukannya.

Para orang tua umumnya memahami bahwa belajar merupakan satu-satunya cara agar anak menjadi pintar, padahal belajar sambil bermain memberikan esensi yang berbeda bagi anak, berupa rasa gembira, lepas dari segala beban, bebas memilih, serta bebas berekspresi. Dalam Bahasa sederhana, belajar sambil bermain akan mengasah dan meningkatkan kecerdasan seorang anak. Dalam metode pembelajaran Anak Usia Dini (AUD) di sekolah-sekolah, terutama sekolah yang sudah menerapkan kebijakan PAUD Holistik Integratif menggunakan metode pembelajaran sentra. Metode pembelajaran sentra dan lingkaran merupakan salah satu

metode pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini yang mengedepankan konsep bermain bagi anak sehingga pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal. Dalam metode ini, alat dan bahan permainan dikelompokkan dalam beberapa sentra yang dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak. Setiap anak pada dasarnya cerdas, akan tetapi kecerdasan tidak semata-mata merujuk pada kecerdasan intelektual, melainkan kecerdasan majemuk (Bahasa, logika, visual, spasial, music kinestetik, interpersonal, natural, dan moral) sehingga setiap anak memiliki kecerdasan ini dengan taraf berbeda. (Nurjatmika, 2012)

6) Standar Nasional Sarana dan Prasarana PAUD HI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Pengadaan sarana dan prasarana meliputi ;

- a. Aman, bersih, sehat, nyaman dan indah
- b. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak
- c. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

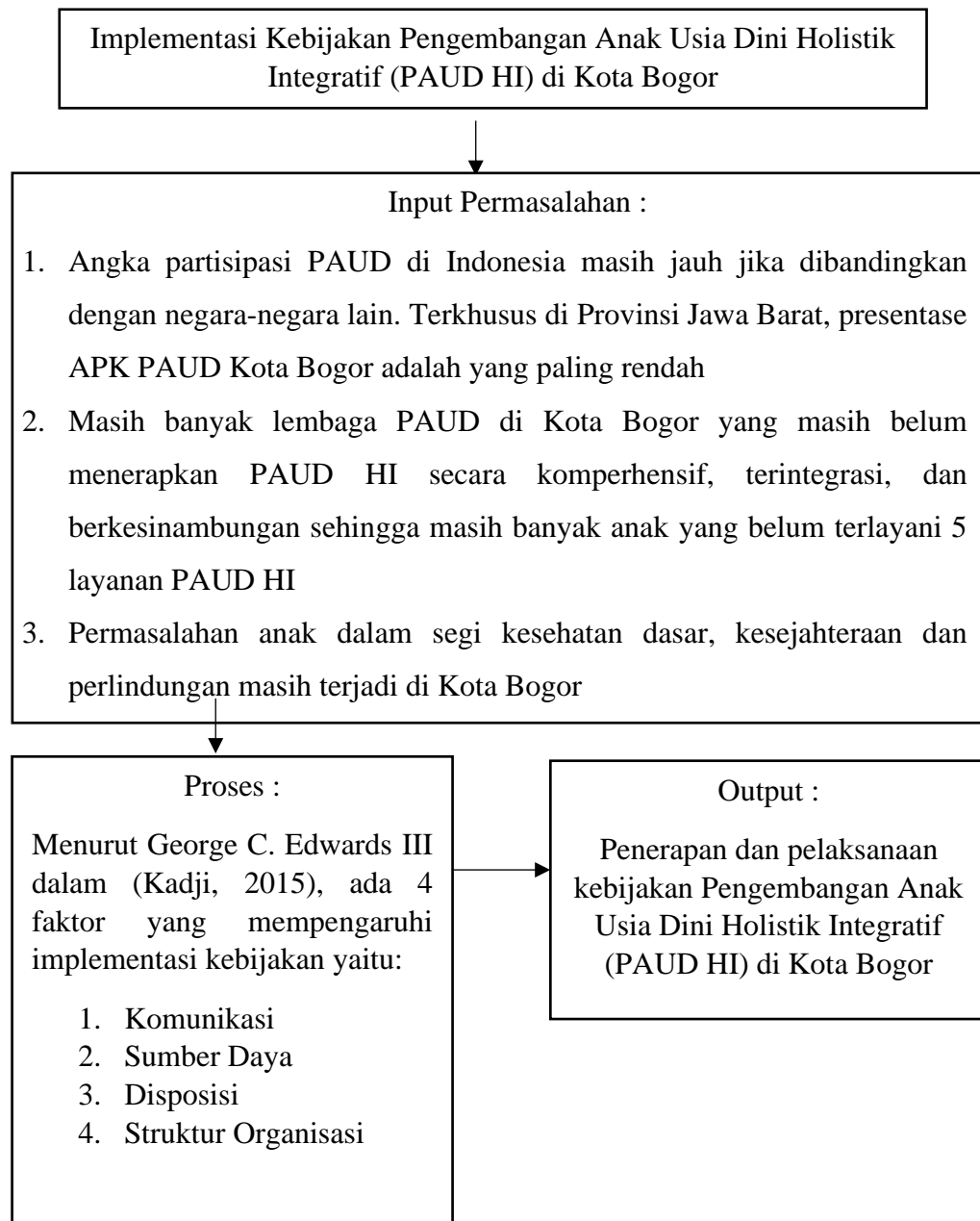
Persyaratan sarana dan prasarana terdiri atas:

- A. TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan meliputi :
  - a. Memiliki luas lahan minimal 300m<sup>2</sup> (untuk bangunan dan halaman)
  - b. Memiliki ruang kegiatan yang aman dan sehat dengan rasio 3m<sup>2</sup> per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih
  - c. Memiliki ruang guru
  - d. Memiliki ruang kepala
  - e. Memiliki ruang tempat UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)

- f. Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru
  - g. Memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak
  - h. Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia)
  - i. Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun luar ruangan yang aman dan sehat
  - j. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar
- B. Kelompok Bermain (KB), meliputi :
- a. Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3m<sup>2</sup> per-anak
  - b. Memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak
  - c. Memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan
  - d. Memiliki tempat sampah tertutup dan tidak tercemar
- C. Taman Penitipan Anak (TPA), meliputi :
- a. Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3m<sup>2</sup> per-anak
  - b. Memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar
  - c. Memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih
  - d. Memiliki kamar mandi dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan
  - e. Memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat
  - f. Memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi yang aman dan sehat
  - g. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar
  - h. Memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas
  - i. Memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan indicator menurut George C. Edwards III sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Permasalahan yang telah teridentifikasi yakni dalam partisipasi masyarakat yang masih rendah karena minimnya

kesadaran orang tua dan keluarga tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Dari 500 Satuan PAUD, hanya 100 Satuan PAUD yang menerapkan PAUD HI, dan masih adanya permasalahan yang menimpa anak usia dini di Kota Bogor yang seharusnya dapat diminimalisir melalui program PAUD HI.

Permasalahan tersebut kemudian di analisis menggunakan teori George C. Edwards III mengenai implementasi kebijakan yang terdiri dari:

1. Komunikasi, berkaitan dengan penyaluran komunikasi yang baik dan kejelasan komunikasi yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam pelaksanaan kebijakan PAUD HI dan konsistensi kebijakan PAUD HI
2. Sumber Daya, berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia (sarana dan prasarana) di Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam melakukan implementasi kebijakan PAUD HI
3. Disposisi, berkaitan dengan pengangkatan implementor yang memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan terlebih pada kepentingan masyarakat dari Dinas Pendidikan Kota Bogor dan sekolah dalam pelaksanaan program PAUD HI di Kota Bogor dan insentif yang diberikan terkait tugas dan fungsi implementor
4. Struktur Birokrasi, berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) program PAUD HI dan fragmentasi dalam pelaksanaan program karena hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengimplementasian kebijakan PAUD HI di Kota Bogor

Hasil dari analisis menggunakan indicator tersebut adalah peneliti dapat mengetahui pelaksanaan layanan PAUD HI di Kota Bogor.